

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEBAGAI MOTOR PENGGERAK IPM JAWA BARAT

Westi Riani*

Abstrak

Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Rata-rata lama Sekolah. Dibanding dua komponen pembentuk IPM yang lain yaitu indeks Kesehatan dan indeks Daya Beli, pencapaian indek Pendidikan di Jawa Barat selama ini relatif paling besar. Kondisi ini diharapkan bisa menjadi motor penggerak pembangunan di bidang lainnya.

Sesuai dengan Visi Jawa Barat, pencapaian IPM 80 pada tahun 2010 merupakan tugas besar yang harus diwujudkan. Terjadinya kesenjangan yang cukup besar antara target dan realisasi, mendorong digulirkannya visi percepatan berupa “ Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Guna Mendukung Pencapaian Visi Jawa Barat 2010”. Strategi pembangunan di bidang pendidikan diprioritaskan untuk Peningkatan Indeks Pendidikan dan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, serta Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pendidikan.

Kata Kunci : Angka Melek Huruf, Rata-rata lama Sekolah, dan IPM

1 Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Pembangunan ekonomi suatu daerah/negara, sering diukur berdasarkan tingkat kemajuan struktur produksi dan penyerapan tenaga kerja (*employment*). Secara umum, sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Tinggi rendahnya hasil pembangunan hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan GNP, baik secara keseluruhan maupun per kapita, yang diyakini akan mampu menumbuhkan “efek penetasan ke bawah” (*trickle down effect*) sehingga

* Westi Riani, SE, .M.Si. adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi Unisba

pada akhirnya akan tercipta distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata.

Terjadinya tingkat kemiskinan absolut yang semakin parah, ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin mencolok serta tingkat pengangguran yang terus melonjak, mendorong munculnya pandangan baru untuk mendefinisikan indikator pembangunan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak menjamin meningkatnya taraf hidup sebagian besar penduduknya. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi tidak lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja. Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, untuk menuju suatu kondisi kehidupan yang serba baik, secara materiil maupun spiritual. (Todaro, 2004: 19 – 21)

Upaya untuk menganalisis status komparatif pembangunan sosial ekonomi secara sistematis dan komprehensif telah dilakukan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) sejak tahun 1990. Pada dasarnya, ada 2 indikator yang diharapkan mampu mengukur pembangunan antara berbagai faktor sosial, ekonomi dan politik, serta indikator yang diharapkan mampu mengukur pembangunan dalam kerangka kualitas hidup. Berdasarkan kombinasi penggunaan indikator tersebut, dihasilkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau identik dengan *Human Development Index* (HDI). (Todaro, 1999 : 73 – 76)

IPM merupakan indikator terbaru untuk pengukuran keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya. Indeks yang disusun UNDP ini merupakan kombinasi data sosial dan ekonomi sehingga merupakan ukuran kinerja pembangunan yang lebih luas. Upaya pencapaian nilai IPM pada suatu tingkat yang lebih tinggi menjadi fokus kebijakan ekonomi dan sosial yang diterapkan oleh beberapa daerah / negara.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, pokok permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah :

- a) Komponen apakah yang selama ini menjadi motor penggerak pencapaian IPM di Jawa Barat ?

- b) Bagaimana strategi dan program prioritas dalam pembangunan pendidikan yang telah dan sedang dijalankan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan IPM?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan Makalah

1.3.1 Tujuan Penulisan Makalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, tulisan ini bertujuan untuk :

- a) Memperoleh pemahaman mengenai sektor yang menjadi motor penggerak pencapaian IPM di Jawa Barat
- b) Mengetahui strategi dan program prioritas dalam pembangunan pendidikan yang telah dan sedang dijalankan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan IPM

1.3.2 Manfaat Penulisan Makalah

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah :

- a) untuk kepentingan akademis : bisa memperkaya wacana akademik yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia
- b) untuk kepentingan praktis: bisa menjadi salah satu rujukan dalam menentukan kebijakan.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 IPM Sebagai Indikator Kinerja Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah gabungan indikator pembangunan sosioekonomi yang memberikan peringkat relatif untuk semua negara maupun daerah pada sebuah skala numerik antara 0,0 (nilai terendah) dan 1,0 (nilai tertinggi) berdasarkan tiga tujuan atau hasil akhir pembangunan yaitu : masa hidup , pengetahuan dan standar kehidupan. (ibid : 68)

IPM merupakan pendekatan terbaru bagi pengukuran keberhasilan pembangunan yang bertitik sentral kepada pembangunan manusia seutuhnya. Dalam perspektif UNDP , pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk, yang hanya mungkin dapat

direalisasikan jika penduduk paling tidak memiliki : peluang umur panjang dan sehat, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Dengan kata lain, pembangunan manusia dapat juga dilihat sebagai pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan ketrampilan, sekaligus sebagai pemanfaatan kemampuan dan ketrampilan . (BPS, 1990 : 3)

Pembangunan manusia dapat juga dilihat dari sisi pelaku atau sasaran yang ingin dicapai. Dalam kaitan ini UNDP melihat pembangunan manusia sebagai semacam “model” pembangunan tentang penduduk, untuk penduduk dan oleh penduduk (BPS, 1990 : 1) :

- Tentang penduduk: berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya.
- Untuk penduduk : berupa penciptaan peluang kerja melalui perluasan pertumbuhan ekonomi dalam negeri
- Oleh penduduk : berupa upaya pemberdayaan penduduk untuk menentukan harkat manusia dengan cara berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan.

Berdasarkan nilai IPM yang dicapai, tingkat pembangunan manusia dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu :

- 1) $0,00 < IPM < 0,499$: tingkat pembangunan manusia yang rendah
- 2) $0,50 < IPM < 0,799$: tingkat pembangunan manusia menengah
- 3) $0,80 < IPM < 1,0$: tingkat pembangunan manusia tinggi

2.2 Penghitungan Indeks Pembangunan manusia (IPM)

IPM merupakan ideks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup , indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) dan indeks standar hidup layak. Kelemahan dari suatu indeks komposit adalah tidak memiliki arti tersendiri secara individual dan ketidaksempurnaannya dalam memberikan saran kebijaksanaan yang jelas (BPS, 1990 : 4). Dibalik kelemahannya, IPM merupakan sarana menarik perhatian masyarakat terhadap pembangunan manusia, dan

direkomendasikan *Statistical Institute for Asian and Pasific* (SIAP) sebagai instrument perbandingan antar wilayah dalam suatu negara.

2.2.1 Komponen dan Indikator IPM

Komponen IPM meliputi usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*desent living*).

- 1) Komponen usia hidup diukur dengan angka harapan hidup, dihitung menggunakan metode tidak langsung berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup.
- 2) Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan , yaitu tingkat / kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
- 3) Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. dengan paritas daya beli (*purchasing power parity* atau PPP) dari mata uang setiap negara untuk mencerminkan biaya hidup dan untuk memenuhi asumsi utilitas marjinal yang semakin menurun dari pendapatan. UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara (BPS, 2002 : xix)

2.2.2 Ilustrasi Penghitungan IPM

Untuk menghitung IPM digunakan persamaan sebagai berikut (BPS, 2002 xxiii):

$$IPM = 1/3 \{ X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)} \} \quad (1)$$

Keterangan :

$X_{(1)}$: indeks harapan hidup

$X_{(2)}$: indeks pendidikan

$X_{(3)}$: indeks standar hidup layak

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih suatu nilai indikator dan nilai minimumnya

dengan selisih nilai maksimum dan minimum indikator yang bersangkutan .
 Dalam bentuk persamaan bisa dituliskan sebagai berikut :

$$\text{Indeks } X_{(i)} = \frac{X_{(i)} - X_{(i)\min}}{X_{(i)\max} - X_{(i)\min}} \quad (2)$$

Keterangan:

$X_{(1)}$: Indikator ke-I (I = 1,2,3)

$X_{(2)}$: Nilai maksimum sekolah $X_{(i)}$

$X_{(3)}$: Nilai minimum sekolah $X_{(i)}$

Nilai maksimum dan minimum indikator $X_{(i)}$ disajikan pada tabel 1 :

Tabel 1. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Indikator Komponen IPM (= $X_{(i)}$)	Nilai Maksimum	Nilai minimum	Catatan
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Melek huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
KKonsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 ^{a)}	300.000 ^{b)}	UNDP menggunakan PDB Per kapita riil yang disesuaikan

Sumber : Indikator Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat Tahun 2002

Catatan:

- a) Proyeksi pengeluaran riil/unit/tahun untuk propinsi yang memiliki angka tertinggi (Jakarta) pada tahun 2018 setelah disesuaikan dengan formula Athkinson.
- b) Setara dengan dua kali garis kemiskinan untuk propinsi yang memiliki angka terendah tahun 1996 di daerah Sulawesi Selatan dan tahun 2000 di Irian Jaya. Konsumsi per kapita yang disesuaikan untuk tahun 2000 sama dengan konsumsi per kapita yang disesuaikan tahun 1996.

Dengan menggunakan persamaan (1) dan (2), nilai IPM suatu daerah / negara bisa didapatkan. Sebaliknya, persamaan tersebut juga bisa digunakan untuk “meramalkan” tingkat pencapaian masing-masing indikator, apabila hasil akhir (IPM) sudah ditargetkan.

3 Pembangunan Pendidikan Sebagai Motor Penggerak Ipm Jawa Barat

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk kemampuan masyarakat untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kemampuan agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan secara berkelanjutan. Keberhasilan pendidikan sangat tergantung pada kualitas kesehatan yang dimiliki. Usia harapan hidup yang lebih panjang dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan. Kesehatan yang lebih baik akan menyebabkan rendahnya tingkat depresiasi dari modal pendidikan. Dengan demikian pendidikan dan kesehatan merupakan komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital. Peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan merupakan kunci untuk menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih baik. (Todaro, 2004 : 404 – 407)

Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin didalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu bangsa. Indeks pendidikan diukur dari kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata tahun bersekolah. Kemampuan baca-tulis orang dewasa tercermin dari data angka melek huruf (*literacy rate*) yaitu proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf lainnya). Rata-rata lama sekolah (*means-years of schooling*) menunjukkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah. (BPS, 2001 : xiv). Pencapaian IPM Jawa Barat dan komponennya ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat dan
Komponennya Tahun 1996, 1999, 2001 dan 2003

Komponen	1996	1999	2001	2003
Angka Harapan Hidup	62,9	64,3	64,80	64,9
Angka Melek Huruf	89,7	92,1	92,40	93,8
Rata-rata Lama Sekolah	6,4	6,8	6,90	7,1
Konsumsi per kapita riil yang disesuaikan	591,6	584,2	538,43	553,7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,2	64,6	66,10	68,36

Sumber : BPS Jawa Barat 2003

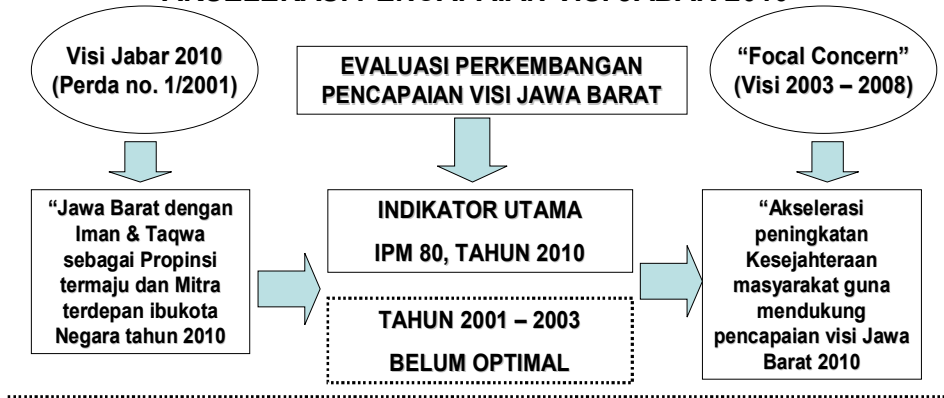
Indeks Pendidikan yang dibentuk berdasarkan pencapaian indikator Angka Melek Huruf dan Rata-rata lama Sekolah, cenderung mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan nilai maksimumnya yang sebesar 100, pencapaian Angka melek Huruf di Jawa Barat sudah sangat baik. Meski demikian, jumlah penduduk buta huruf usia 10 – 44 tahun yang masih diatas 600 ribu jiwa pada tahun 2003, tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi. Disisi lain, pencapaian indikator Rata-rata lama Sekolah di Jawa Barat masih jauh tertinggal dari standar maksimumnya yang sebesar 15 tahun. Sarana pendidikan yang masih kurang memadai ditambah dengan mahalnya biaya pendidikan sering menjadi penyebab belum terealisasinya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun.

Pencapaian IPM 80 sesuai dengan Visi Jawa Barat tahun 2010, merupakan tugas besar yang harus dihadapi masyarakat Jawa Barat. Tidak tercapainya target IPM pada tahun 2003 dan 2004 (tahun 2003 target IPM = 72,3 realisasi IPM = 67,87 dan tahun 2004 target IPM = 73,3, realisasi IPM = 68,36) menunjukkan masih banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan.

Disebabkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara target dan realisasi dan guna memacu roda pembangunan di segala bidang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menggulirkan program percepatan yang dikenal sebagai “Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Guna Mendukung Pencapaian Visi Jawa Barat Tahun 2010”. Program ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada “*stakeholders*” yang ada di Jawa Barat untuk bisa mewujudkan target pencapaian IPM. Dalam pencapaian Indeks Pendidikan misalnya, dengan indikator Angka Melek

Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah, lebih merupakan kewenangan Pemerintah kabupaten/kota, sedangkan kewenangan Pemerintah provinsi terbatas pada pendidikan luar biasa, rekomendasi perguruan tinggi, dan fasilitas penyelenggaraan pendidikan di daerah.

KERANGKA PIKIR AKSELERASI PENCAPAIAN VISI JABAR 2010



Pencanangan & Internalisasi Visi	Akselerasi Pencapaian Visi						Pemantapan & Evaluasi
2001		2003				2008	2010

sumber : [www. BPS Jabar, go.id](http://www.BPS Jabar, go.id)

Berdasarkan pada target-target yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengembangkan program-program prioritas dan rencana aksi 2004 -2008 dalam dua strategi dan program kegiatan prioritas. (Tim Bapeda Provinsi Jawa Barat , dalam Pikiran Rakyat 19 Oktober 2004)

3.1 Strategi Peningkatan Indeks Pendidikan dan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Program dan kegiatan yang mendukung strategi ini dikembangkan dalam dua jalur model program dan kegiatan prioritas, yaitu :

- a) Jalur pendidikan non formal, dengan memposisikan pendidikan luar sekolah (nonformal) sebagai akselerator jalur alternatif, dan katalisator peningkatan indeks pendidikan. Esensi dari model strategi alternatif ini adalah terbukanya peluang bagi masyarakat yang kurang beruntung (secara sosial, ekonomi dan kultural) untuk memperoleh pemerataan kesempatan dan akses kepada pelayanan pendidikan terutama pada jenjang pendidikan dasar, serta memberikan manfaat sebagai bekal hidup. Program kegiatan yang dikembangkan dalam jalur pendidikan nonformal meliputi :
 - 1) Keaksaraan Fungsional Dinas pendidikan : merupakan salah satu kegiatan untuk menanggulangi buta huruf.
 - 2) Kejar Paket A, Paket B dan Paket C : merupakan alternatif Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun melalui Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- b) Jalur pendidikan formal, terdiri dari jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Prioritas program dan kegiatan pendidikan formal dalam rangka penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun adalah :
 - 1) Penanggulangan siswa yang terancam DO : salah satu upaya yang telah dan akan digulirkan adalah pemberian beasiswa bagi anak yang tidak mampu.
 - 2) Peningkatan daya tampung pendidikan dasar: upaya strategis yang dilakukan adalah melalui pembangunan sekolah baru, sekolah terbuka dan *double shift*.
 - 3) Peningkatan sarana dan prasarana sekolah, dengan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota

3.2 Strategi peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pendidikan.

Strategi untuk membangkitkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di Jawa Barat, misalnya dalam bentuk :

- 1) Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan : merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat untuk mengatasi masalah pendidikan di Jawa Barat. Beberapa bentuk kepedulian masyarakat Jawa Barat yang sudah dan sedang dijalankan antara lain:
 - a. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh
 - b. Gentramasekdas
 - c. Rereongan Sarupi
 - d. Infaq pendidikan
- 2) Beasiswa Silang, dengan pengembangan model dalam variasi bentuk berupa :
 - a. Beasiswa pendidikan dengan kartu sehat
 - b. Beasiswa pendidikan anak kepada orang tua dalam bentuk stimulant dana produktif.
 - c. Pemberian penghargaan untuk perseorangan / lembaga / daerah yang telah menunjukkan kontribusi dalam rangka akselerasi pendidikan.

3.3 Peranan Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat

Dalam skema IPM, ukuran kinerja pembangunan di bidang pendidikan akan tertuang dalam besarnya pencapaian indeks pendidikan. Dalam kondisi perekonomian yang masih mengalami krisis, ditunjukkan dengan daya beli masyarakat yang rendah, peran indeks pendidikan dalam pencapaian IPM menjadi sangat penting. Turunnya indeks daya beli, tanpa diimbangi dengan naiknya komponen IPM yang lain, akan menyebabkan pencapaian IPM yang semakin kecil.

Tabel 3 : Kontribusi Komponen IPM Jawa Barat
Tahun 1996 dan 2003

Komponen IPM	1996		2003	
	Nilai	Kontribusi terhadap IPM (%)	Nilai	Kontribusi terhadap IPM (%)
Indeks Kesehatan	0,631	30,865	0,665	32,650
Indeks Pendidikan	0,740	36,173	0,785	38,560
Indeks Daya Beli	0,673	32,962	0,586	28,790
IPM	68,2	100	67,87	100

Sumber : BPS, diolah

Pada tahun 1996, kontribusi indeks pendidikan dalam membentuk IPM Jawa Barat adalah sebesar 36,173 %. Dibandingkan dengan indeks kesehatan dan indeks daya beli, peranan hasil kinerja pembangunan pendidikan ini tidak begitu dominan.

Tahun 2003, kontribusi indeks pendidikan dalam membentuk IPM Jawa Barat mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 38,56 %. Naiknya kontribusi indeks pendidikan tersebut menunjukkan hasil pembangunan di bidang pendidikan, yang antara lain tercermin dari meningkatnya Angka melek huruf sebesar 4,1 poin, dan meningkatnya Rata-rata lama sekolah sebesar 0,7 poin selama periode 1996- 2003 (lihat tabel 2).

Disisi lain, naiknya kontribusi indeks pendidikan dalam membentuk IPM Jawa Barat juga disebabkan oleh turunnya pencapaian indeks Daya beli sebagai akibat merosotnya daya beli masyarakat. Tahun 1996, kemampuan konsumsi per kapita riil yang disesuaikan untuk masyarakat Jawa Barat mencapai 591,6 ribu rupiah. Terjadinya krisis moneter yang ditandai dengan melonjaknya harga barang-barang kebutuhan, menyebabkan terjadinya penurunan pada kemampuan konsumsi rata-rata masyarakat Jawa Barat menjadi sebesar 553,7 ribu rupiah pada tahun 2003. Hal ini menyebabkan merosotnya pencapaian indeks Daya beli sebesar 0,087 poin selama periode tersebut. Kontribusi indeks Daya beli terhadap IPM mengalami penurunan sebesar 4,17 %.

4 Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

1. Dalam Skema IPM, prestasi pembangunan pendidikan terukur dari besarnya indeks pendidikan. Indeks pendidikan dibangun berdasarkan pencapaian indikator Angka melek huruf dan Rata-rata lama sekolah. Selama periode 1996- 2003, indeks pendidikan merupakan komponen pembentuk IPM dengan kontribusi terbesar. Pembangunan pendidikan merupakan motor penggerak pencapaian IPM Jawa Barat.
2. Untuk mengatasi kesenjangan yang cukup besar antara target dan realisasi, Pemerintah daerah Jawa Barat menerapkan program percepatan yang dikenal sebagai “Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Guna mendukung Pencapaian Visi Jawa Barat 2010 “.

4.2 Saran

1. Pencapaian IPM 80 sesuai dengan Visi Jawa Barat pada tahun 2010, merupakan bentuk target ambisius untuk mencapai pengakuan daerah dengan tingkat pembangunan manusia kelompok tinggi (sejahtera). Diperlukan upaya pembangunan secara serentak baik dalam bidang kesehatan , pendidikan dan daya beli. Disamping penerapan strategi pembangunan secara komprehensif, partisipasi dari semua pihak baik masyarakat, swasta maupun pemerintah sangat diperlukan untuk bisa mewujudkannya .
 2. Prestasi Pembangunan Pendidikan yang terukur dari Indeks pendidikan sepertinya belum merupakan cerminan dari hasil pembangunan pendidikan seutuhnya. Ada banyak hal yang seharusnya bisa menjadi bagian dari tolok ukur pembangunan pendidikan, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Dari sisi permintaan, pembangunan pendidikan akan tercermin dari peningkatan manfaat pendidikan bagi siswa dan / atau keluarganya. Sedangkan dari sisi penawaran pembangunan pendidikan bisa dinilai dari mutu dan jumlah penyediaan sarana sekolah yang telah didirikan.
-

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal :

- BPS. 1990. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta : BPS
- _____. 1999 *Indikator Sosial Wanita Indonesia*. Jakarta : BPS
- _____. 2001, *Data Basis Untuk Analisis Pembangunan Manusia*. Jakarta : BPS.
- _____. 2002. *Indikator Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat*. Bandung : BPS Jawa Barat
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. *Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Todaro, Michael P. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- _____. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Keenam. Jakarta : Penerbit Erlangga.

B. Surat Kabar :

- Tim Bapeda Provinsi Jabar. *Prioritas IPM dan Penuntasan Wajar Dikdas. Pikiran Rakyat* 19 Oktober 2004
- , 2004. *Nilai IPM Jabar 68 Cermin SDM Rendah, Pikiran Rakyat*, 3 Maret 2004

C. Home Page :

- Home Page : www.Jabar.bps.go.id
- _____ : www.Jabar.go.id